

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Secara Umum.....	19
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia..	21
3. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.....	31
1. Dasar dan Tujuan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi	31
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	33
C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	36
1. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan	36
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	40
2. Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Sifat Penelitian.....	49
B. Jenis Pendekatan Penelitian.....	50
C. Bahan Penelitian.....	52
1. Jenis Data.....	52
2. Lokasi Penelitian.....	57
3. Subjek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	59
E. Analisis Data Penelitian.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.....	63
1. Pemahaman Formulasi Pasal 40 ayat (1) UU KPK 2019 Kaitannya dengan Kewenangan KPK dalam Menerbitkan SP3.....	65
2. Pertimbangan KPK dalam Menerbitkan SP3 Terhadap Kasus BLBI dengan Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim	79
a. Tidak Terdapat Unsur Penyelenggara Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi BLBI oleh BDNI dengan Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim	84
b. Perbuatan yang Dilakukan Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim Bukanlah Tindak Pidana.....	91
B. Upaya Hukum Lebih Lanjut yang Dapat Dilakukan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Sehubungan Dengan Adanya Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.....	103
1. Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan.....	106

a. Kaitan Antara Pengajuan Kembali Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan dengan Prinsip <i>Ne Bis In Idem</i>	113
b. Kaitan Antara Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara BLBI oleh BDNI dengan Jatuh Waktu Daluwarsa Perkara.	118
2. Pengajuan Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau Gugatan oleh Instansi yang Dirugikan	130
3. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).....	142
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	156